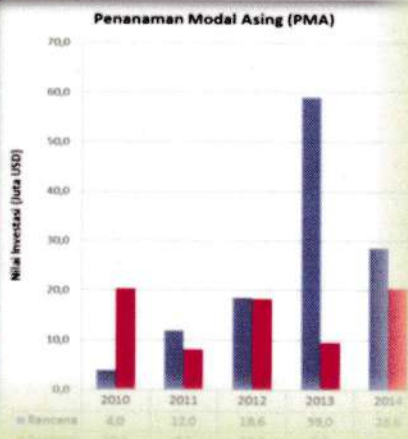
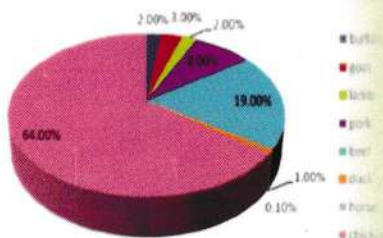
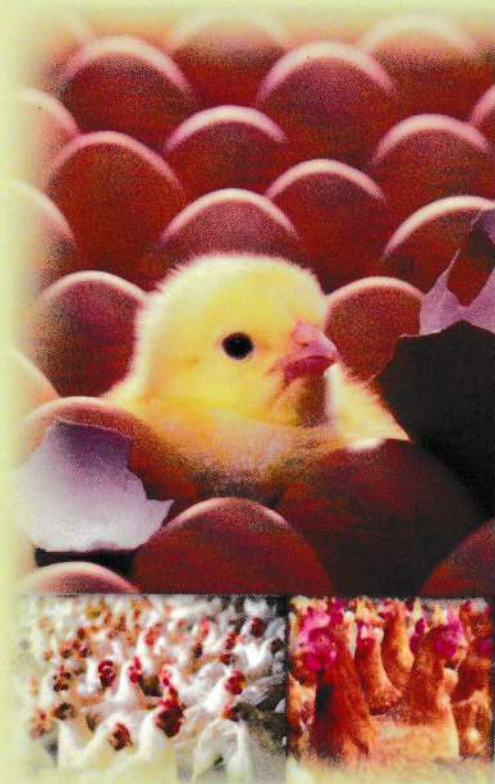


MENYIKAPI KERJASAMA INDUSTRI PENGOLAHAN AYAM BERBAHAN BAKU IMPOR



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2015**

MENYIKAPI KERJASAMA INDUSTRI PENGOLAHAN AYAM BERBAHAN BAKU IMPOR

Penyusun:

Atien Priyanti
Tjeppy D. Soedjana
Eko Handiwirawan
Kusuma Diwyanto
Priyono
Bess Tiesnamurti



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2015**

KATA PENGANTAR

Indonesia perlu mendorong kerjasama investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Salah satu bentuk realisasinya adalah kesepakatan kerjasama investasi perusahaan multinasional Brazil dan Indonesia untuk memproduksi pangan olahan berbasis unggas pada bulan Desember 2014. Kerjasama ini diharapkan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang tinggi, karena dapat meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing industri perunggasan. Namun, kerjasama tersebut harus diwaspadai karena bahan baku pengolahan tersebut bisa saja berasal dari Brazil, yang memang sudah sejak lama menginginkan masuknya produk unggas ke Indonesia. Apabila hal ini terwujud, maka industri perunggasan nasional dapat menghadapi kendala serius.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) telah mengadakan *roundtable meeting* bertemakan "Menyikapi Kerjasama Industri Pengolahan Ayam Berbahan Baku Impor" pada tanggal 15 April 2015 di Jakarta. Diskusi ini menghadirkan beberapa nara sumber dan peserta yang rumusannya didokumentasikan dalam buku ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga berbagai informasi yang dimuat dapat memberikan inspirasi bagi kita semua dalam menyikapi kerjasama investasi tersebut dalam

rangka meningkatkan daya saing industri perunggasan nasional.

Bogor, Juni 2015

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan,

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke across the middle.

Dr. Bess Tiesnamurti

Lampiran	37
Perkembangan Perunggasan Indonesia	39
Perkembangan Investasi pada Usaha Peternakan (Ayam Ras)	42
Mengembangkan Daya Saing Industri Perunggasan Indonesia	44
Ancaman Masuknya Produk Ayam terhadap Daya Saing Usaha Peternakan Rakyat	46

PENDAHULUAN

Produksi daging unggas telah menyumbang lebih dari 65% dari total kebutuhan konsumsi daging di dalam negeri. Sekitar 90% berasal dari ayam ras, yang meningkat sebesar 14,8% dibandingkan pada tahun 2011 (Susenas, 2011-2014). Meskipun demikian, konsumsi ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti misalnya Malaysia. Tangendjaja (2014) melaporkan bahwa konsumsi broiler per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2013 mencapai 8 kg dan telur sebesar 110 butir, jauh tertinggal oleh Malaysia dengan konsumsi 36 kg ayam broiler dan 330 butir telur per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, potensi pertumbuhan industri unggas dalam negeri masih terbuka luas. Permintaan terhadap daging ayam akan selalu meningkat karena beberapa faktor, antara lain, peningkatan pendapatan, pertumbuhan penduduk, peningkatan penduduk kelas menengah, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup (*life style*). Di wilayah perkotaan, permintaan terhadap makanan yang siap masak (*ready to cook*) dan siap santap (*ready to eat*) juga semakin meningkat, sehingga semakin banyak pasar swalayan yang menawarkan beragam komoditas dan produk olahan daging ayam. Daging ayam sampai saat ini memiliki peran sebagai penyedia protein hewani yang paling terjangkau dibandingkan dengan produk peternakan lainnya.

Potensi pasar yang sangat besar ini sangat menarik bagi produsen daging unggas terbesar dunia, seperti Amerika Serikat dan Brazil untuk memasukkan produknya ke Indonesia. Perkembangan perusahaan multinasional ke negara-negara berkembang berjalan dengan sangat cepat. Ekspansi perusahaan domestik dan multinasional yang berskala besar dan modern ini akan semakin tumbuh yang didukung juga oleh terbentuknya integrasi pasar regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu persyaratan aspek aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) masih menjadi penghalang, terutama aspek kehalalan. Meskipun demikian, jika produk impor tersebut dapat memenuhi syarat ASUH dengan harga lebih murah, maka dapat menjadi salah satu pilihan konsumen di dalam negeri. Amerika Serikat telah menggugat Pemerintah Indonesia dalam pertemuan panel di WTO tahun lalu, dan pada tahun ini Brazil akan melakukan hal yang sama.

Kerjasama investasi antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan asing dalam memproduksi pangan olahan berbasis protein hewani, utamanya ayam ras dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif dalam mendorong berkembangnya industri di dalam negeri. Kehadiran perusahaan asing yang modern memiliki keunggulan dalam mengontrol kualitas di seluruh proses produksi dengan lebih ketat. Perusahaan ini juga mampu mengelola seluruh rantai pasok ritel yang terorganisasi secara efisien dan efektif dalam menelusuri keberadaan kualitas produk dari kandang

sampai pasar, sehingga memberikan rasa aman kepada konsumen. Disamping itu, produksi daging ayam oleh perusahaan ini lebih efisien dan lebih berdaya saing dengan skala ekonomi sebagai landasan bisnis. Dengan demikian, kerjasama tersebut dapat memberikan peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan hewani.

Pada tanggal 19 Desember 2014 telah ditandatangani kesepakatan kerjasama investasi perusahaan multinasional Brazil dan Indonesia untuk memproduksi pangan olahan berbasis unggas. Pola kerjasama tersebut perlu diwaspadai karena sangat dimungkinkan akan menggunakan bahan baku dari negara asal. Perkiraan ini sangat relevan karena sudah sejak lama Brazil menginginkan masuknya produk ini ke Indonesia yang disebabkan oleh adanya surplus produk ayam yang tidak diinginkan oleh konsumen di negara maju, seperti paha bawah, sayap dan *ceker*. Jika perkiraan ini menjadi kenyataan, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi industri perunggasan di dalam negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri ayam ras nasional telah mampu berswasembada dalam memproduksi daging dan telur, bahkan telah melakukan ekspor ke beberapa negara. Industri ini juga telah memiliki investasi yang sangat besar dengan *multiplier effect* yang signifikan terhadap sektor tenaga kerja, jasa dan perdagangan. Saat ini, industri ayam ras

berproduksi dibawah kapasitas produksinya, sehingga sudah selayaknya jika pemerintah memberikan perlindungan terhadap isu ini.

TAHAPAN KEGIATAN

Industri perunggasan (ayam ras) berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan sektor peternakan yang telah mampu mewujudkan swasembada daging dan telur bahkan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk ekspor. Sebuah perusahaan multinasional asal Brazil telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sebuah perusahaan swasta nasional di Indonesia dalam hal pengolahan pangan berbasis daging ayam. Dana investasi yang akan dikucurkan mencapai USD 200 juta dalam jangka waktu 3 tahun, dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 50%. Perusahaan dari Brazil ini merupakan perusahaan makanan terbesar ke-7 di dunia, dan termasuk salah satu eksportir utama pangan hewani yang menjangkau 110 negara.

Pada dasarnya bentuk investasi ke Indonesia tidak dilarang dan bahkan didorong untuk tumbuh dalam lingkungan yang kondusif. Namun, jika bahan baku yang digunakan harus berasal dari Brazil, hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sudah sejak lama, Brazil menginginkan produk ayamnya dapat memasuki pasar Indonesia. Oleh karena itu, rencana kerjasama tersebut perlu selalu dikawal dan dicermati dengan seksama dalam hal *mutual benefit*nya. Akankah kerjasama tersebut juga memberikan transfer teknologi (kekuatan produksi) dan modal, sedangkan Indonesia berperan dalam rantai tata niaga dan distribusi, pengolahan serta jasa kemasan?

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) telah mengadakan *roundtable meeting* bertemakan "Menyikapi Kerjasama Industri Pengolahan Ayam Berbahan Baku Impor" pada tanggal 15 April 2015 di Jakarta. Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber terkait dan hasil diskusi diharapkan dapat memberikan rekomendasi/opsi alternatif kebijakan terhadap peningkatan daya saing industri perunggasan di dalam negeri.

Narasumber dari kegiatan ini meliputi:

1. Direktur Perencanaan Investasi Pertanian dan Sumber Daya Alam Lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan topik bahasan "Perkembangan dan Rencana Investasi Penanaman Modal Asing pada Usaha Peternakan (Ayam Ras)".
2. Ketua Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia, Ir. Don P. Utoyo, dengan topik bahasan "Perkembangan Industri Perunggasan di Indonesia".
3. Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Dr. Rachmat Pambudy, dengan topik bahasan "Daya Saing Industri Perunggasan Menghadapi Ancaman Masuknya Produk Impor".
4. Ketua Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia, Ir. Achmad Dawami, dengan topik

bahasan "Ancaman Masuknya Produk Ayam terhadap Daya Saing Usaha Peternakan Rakyat".

Pertemuan ini dihadiri oleh 50 peserta dari lingkup Kementerian Perdagangan (Dit. Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Dit. Pusat Data dan Informasi Perdagangan), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Litbang Pertanian), Perguruan Tinggi (UNPAD, IPB), Dinas Peternakan (Banten, Jawa Barat), Asosiasi Perunggasan (FMPI dan ASOHI) dan organisasi profesi (PB-PDHI dan PB-ISPI).

SASARAN DAN TUJUAN

SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari diskusi ini adalah meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan kerjasama investasi pada industri pengolahan ayam yang dapat merugikan industri perunggasan di dalam negeri. Saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pangan di dalam negeri agar kedaulatan pangan dapat segera diwujudkan.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan diskusi ini adalah untuk mensintesis dan menganalisis alternatif/opsi kebijakan terkait dengan kerjasama investasi industri pengolahan ayam berbahan baku impor dalam rangka menjaga keberlangsungan dan peningkatan daya saing industri ayam ras dalam negeri. Informasi dan saran kebijakan operasional sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan dalam pengaturan yang kondusif dalam menyikapi kerjasama investasi industri pengolahan ayam berbahan baku impor dalam rangka menjaga keberlangsungan dan peningkatan daya saing industri ayam ras dalam negeri.

KONDISI INDUSTRI PERUNGGSAN DI INDONESIA

Industri perunggsan di dalam negeri berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan sektor peternakan yang telah mampu mewujudkan swasembada daging dan telur bahkan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk ekspor. Industri ini memiliki nilai investasi yang cukup besar saat ini dengan total *asset* mencapai USD 5 Milyar dan USD 3 Milyar untuk industri *broiler* (ayam pedaging) dan *layer* (ayam petelur). Diperkirakan hal ini akan tumbuh mencapai USD 7 Milyar dan USD 4 Milyar. Industri ini juga memiliki *multiplier effect* yang signifikan terhadap sektor tenaga kerja, jasa dan perdagangan, dimana terdapat lebih dari 3,5 juta tenaga kerja yang terserap dalam industri perunggsan (Utoyo, 2015). Jika satu tenaga kerja memiliki 3 anggota keluarga, maka sekitar 14 juta penduduk menggantungkan hidupnya dari bisnis perunggsan. Bisakah disampaikan ketergantungan bahan impor.

Industri perunggsan telah mampu menghasilkan produk yang sangat terjangkau, walaupun saat ini rata-rata konsumsi telur dan daging unggas masih cukup rendah. Komoditas ini adalah yang paling murah dibandingkan komoditas peternakan lainnya dalam menyediakan protein hewani. Rata-rata konsumsi telur dan daging ayam masing-masing baru mencapai 8 kg/kap/tahun dan 10 kg/kap/tahun. Bila diasumsikan setiap kg telur berisi 16 butir, maka rata-rata konsumsi

telur yang harganya setara dengan sebatang rokok (Rp.1.000) baru sekitar 120 butir/kap/tahun, yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata konsumsi rokok yang sudah mencapai lebih dari 1.050 batang/kap/tahun.

Sebesar besar industri perungggasan masih mengenakan komponen impor, seperti bibit, pakan, vaksin dan obat hewan serta peralatan dan mesin lainnya. Bibit sepenuhnya masih tergantung dari impor karena belum dapat menghasilkan DOC didalam negeri. Jagung dan komponen lainnya masih mengandalkan impor mencapai sekitar 40% . Demikian pula halnya untuk vaksin dan obat hewan serta peralatan/mesin lainnya dengan kisaran 3-5%

Permintaan produk unggas ditengarai terus meningkat dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh: (i) Perubahan demografi penduduk, meliputi pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, semakin banyaknya penduduk kelas ekonomi menengah, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup; (ii) Peningkatan permintaan pangan siap saji, utamanya di wilayah perkotaan dan peningkatan permintaan produk olahan baik di restoran, supermarket maupun pasar tradisional; (iii) Peningkatan kesadaran gizi masyarakat dan aspek kesehatan dengan perubahan dari daging merah ke daging putih; (iv) Sumber protein hewani yang paling murah dibandingkan komoditas peternakan lainnya; dan (v) Mudah diakses dan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (kehalalan).

Indonesia telah berswasembada daging dan telur ayam, bahkan masih memiliki peluang ekspor yang menjanjikan untuk produk olahan. Pada tahun 2014, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menginisiasi peluang ekspor produk olahan ayam ke Jepang, dan diharapkan dapat terwujud dalam satu atau dua tahun mendatang. Sampai dengan akhir tahun 2014, rata-rata produksi *day old chicks* (DOC) *final stock* masing-masing untuk broiler dan layer telah mencapai 49 juta ekor dan 2,2 juta ekor per minggu, dimana potensinya pada tahun 2015 dapat mencapai 64 juta ekor dan 4 juta ekor per minggu (Dawami, 2015). Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari 2,5 Milyar dan 115 juta DOC *final stock broiler* dan *layer* diproduksi setiap tahun. Saat ini, produksi berada dibawah kapasitas terpasang, dan diwacanakan bahwa tahun depan akan dilakukan pemotongan produksi sampai 30% karena *over supply*. Namun demikian, pertimbangan dampak lanjutan dari besaran angka pemangkasan ini pada periode berikutnya perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Usaha budidaya dalam industri perunggasan nasional pada umumnya dilakukan secara tradisional oleh peternakan rakyat dan sebagian dilakukan oleh perusahaan swasta yang lebih modern. Pemasaran produk dari usaha budidaya tersebut didistribusikan dengan sasaran dari pasar tradisional hingga super *market* dengan mata rantai pasokan daging ayam yang panjang. Industri perunggasan nasional perlu

peningkatan kemampuan bersaing melalui penerapan teknologi yang lebih maju, penyediaan sarana yang lebih baik, penanganan kesehatan dan kesejahteraan serta pengembangan model usaha sesuai sumber daya lokal.

Di sektor hilir, industri pengolahan daging ayam berkembang sangat, dimana pada tahun 2010 terdapat 23 perusahaan yang meningkat menjadi 30 perusahaan pada tahun 2014 (Pambudy, 2015). Hal ini mengakibatkan peningkatan kapasitas sekitar 230% dan meningkatkan produksi sekitar 159%. Dalam hal utilisasi (penggunaan), hal ini mengalami penurunan dari semula sekitar 78% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014.

Masalah utama dalam pengembangan industri pengolahan daging adalah ketersediaan bahan baku baik dalam jumlah, kualitas maupun harga. Saat ini pasokan bahan baku dari dalam negeri masih sangat terbatas sehingga masih bergantung dari bahan baku impor. Minimnya pelaksanaan mekanisme rantai pasok dingin yang tersedia baik dalam bentuk *freezer* di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun *mobile freezer* untuk transportasi daging beku ke industri pengolahan daging merupakan kendala yang harus dihadapi oleh industri pengolahan. Disamping itu, permasalahan eksternal yang dihadapi industri perunggasan nasional antara lain, adalah tingginya laju inflasi dan instabilitas kondisi makro, isu pemerataan pendapatan, kesamaan keunggulan komparatif dan iklim usaha serta kinerja UMKM yang masih rendah.

PERKEMBANGAN INVESTASI INDUSTRI PERUNGGANAN

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada industri perunggasan tahun 2013 masing-masing mencapai Rp 1,8 triliun dan USD 219,8 juta. Rata-rata pertumbuhan realisasi PMDN sektor industri makanan dari produk unggas selama 5 tahun terakhir (2010-2014) sebesar 95,4%, sedangkan sektor perdagangan hewan unggas dan daging unggas sebesar 2519,2% (BKPM, 2015). Hal tersebut pada rata-rata pertumbuhan realisasi PMA pada periode yang sama mencapai 52,3%, sedangkan sektor perdagangan hewan unggas dan daging unggas sebesar 106,7%. Angka realisasi investasi pada industri ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik dengan indikasi memperlihatkan perbaikan iklim dan pelayanan investasi yang kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa investasi PMDN masih lebih besar daripada investasi PMA, dimana hampir sebagian besar masih terpusat di Pulau Jawa.

Terdapat 3 kegiatan investasi dalam sektor perunggasan, yakni kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, industri pakan ternak serta industri farmasi dan produk obat kimia. Realisasi investasi pada kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas selama 5 tahun terakhir (2010-2014) lebih rendah dibandingkan dengan rencananya baik

untuk PMDN maupun PMA. Dibandingkan dengan rencana investasi PMDN, maka realisasi investasi sektor perunggasan lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi investasi PMA. Sebaliknya, pada industri pakan ternak realisasi investasi jauh lebih tinggi daripada rencana, masing-masing 2,4 kali dan 2,3 kali lipat pada PMA dan PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa industri pakan ternak tumbuh pesat selama periode tersebut dimana pada tahun 2015 terdapat 80 pabrik pakan, meningkat 30% dibandingkan pada tahun 2010 yang baru mencapai 60 pabrik pakan. Produksi pakan mencapai 15 juta ton pada tahun 2015, meningkat 5,1 juta ton dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 9,9 juta ton. Industri farmasi dan produk obat kimia menunjukkan bahwa realisasi investasi PMA lebih tinggi daripada yang direncanakan, sedangkan untuk PMDN realisasi investasi lebih rendah dari rencana.

Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menyatakan bahwa bidang usaha peternakan unggas termasuk didalamnya jasa penunjang peternakan serta industri pengolahan dan pengawetan produk unggas termasuk kedalam kategori "terbuka tanpa persyaratan" baik bagi PMDN maupun PMA. Namun, perlu diwaspadai dan dicermati lebih lanjut bila industri pengolahan daging unggas ini akan menggunakan bahan bakunya seperti yang dipersyaratkan dalam kerjasama tersebut berasal dari Brazil. Jika persyaratan ini dipenuhi maka akan

berdampak serius terhadap masa depan industri perunggasan Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan kenaikan penduduk ekonomi menengah yang cukup signifikan, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial yang sudah pasti dijadikan pertimbangan penting bagi keberlangsungan usaha kerjasama ini. Oleh karena itu, kerjasama tersebut perlu selalu dikawal dan dicermati dengan seksama dalam hal *mutual benefitnya*, terutama dalam menjawab pertanyaan akankah kerjasama tersebut juga melakukan transfer teknologi (kekuatan produksi) dan modal, dimana Indonesia hanya berperan dalam rantai tata niaga dan distribusi, pengolahan serta jasa kemasan saja? Dengan demikian, jika bahan baku industri pengolahan yang dibangun oleh kerjasama patungan tersebut harus didatangkan dari Brazil, perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan investasi untuk produk perunggasan di Indonesia dengan mempertimbangkan perlindungan usaha peternakan dan peningkatan daya saing. Peraturan Pemerintah No. 102/2000 tentang standardisasi nasional dan Permentan Nomor 75/OT.140/11/2011 tentang lembaga sertifikasi produk bidang pertanian mengatur pemasukan produk perunggasan. Hal ini ditujukan guna meningkatkan kualitas produk dalam negeri, efisiensi dan persaingan yang sehat dari produk unggas serta perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah juga telah menetapkan pembatasan ekspor dan impor melalui Peraturan Menteri

Perdagangan No. 24/m-dag/per/9/2011 tentang ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai hewan dan produk hewan dengan mengatur impor, ditetapkan alokasi impor dan ekspor. Hal ini ditujukan terhadap perlindungan dari risiko dari hama atau penyakit (*pest and disease risks*), perlindungan dari risiko-risiko yang timbul dari makanan (*food-borne risks*), dan peningkatan daya saing produk perunggasan.

Apabila produk unggas dari Brazil akan masuk ke Indonesia maka harus disertai dan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Rumah potong ayam yang ada di Brazil harus terakreditasi mengacu pada aturan Indonesia dan dari aspek kehalalan harus mendapat persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia. Perunggasan nasional harus dilindungi karena merupakan industri strategis, yang produknya seperti daging dan telur ayam telah masuk dalam Undang-Undang Pangan sebagai pangan strategis. Apalagi produksi ayam dan telur yang secara nasional berkontribusi lebih dari 65% sebagai sumber utama protein hewani, dan posisinya sudah berswasembada sehingga mampu mencukupi kebutuhan nasional. *Idle capacity* di pabrik pakan maupun di *breeding farm* (perusahaan bibit), menunjukkan industri dalam negeri masih mampu menjawab kebutuhan apabila terjadi lonjakan permintaan, seperti saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan lainnya. Semua syarat aturan yang berlaku di Indonesia harus dipenuhi, terutama aspek

kehalalan untuk melindungi mayoritas penduduk muslim. Sayangnya, hal ini justru tidak didukung oleh kebijakan yang kondusif, dengan terbitnya Permentan No 139/Permentan/PD.410/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 13 (2) menyatakan bahwa "penerapan sistem jaminan kehalalan pada rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal". Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem jaminan kehalalan tidak perlu dilakukan di seluruh rumah potong hewan unggas, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan sebelumnya. Permentan No 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Pasal 11 (2) menyatakan bahwa "untuk produk unggas, sistem jaminan kehalalan harus dilakukan terhadap seluruh rumah potong hewan unggas di negara asal yang dibuktikan dengan sertifikat halal".

DAYA SAING INDUSTRI PERUNGGSAN NASIONAL

Industri perunggsan di Indonesia berkembang dengan sangat pesat seiring dengan semakin tingginya permintaan akan produk unggas. Peningkatan pendapatan dan kesadaran masyarakat telah mendorong peningkatan konsumsi daging broiler. Industri perunggsan yang didominasi oleh ayam ras merupakan produk pangan yang memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, urbanisasi, perubahan gaya hidup turut berkontribusi dalam menciptakan prospek pasar produk unggas tersebut. Seiring dengan diberlakukannya pasar terbuka MEA, maka industri perunggsan di Indonesia harus siap bersaing dengan masuknya produk unggas dari luar negeri.

Produksi unggas di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin berkembangnya genetika ayam dengan output produktivitas daging dan telur ayam yang didukung dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Berdasarkan data dari Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) produksi DOC broiler tahun 2009 – 2013 di Indonesia mengalami peningkatan dengan jumlah produksi DOC broiler mencapai 2,2 milyar.

Daya saing industri perunggsan memegang peranan yang penting untuk dipertahankan dan atau

ditingkatkan agar industri perunggasan di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam perdagangan global. Daryanto (2014) menyatakan bahwa daya saing industri perunggasan dipengaruhi oleh ketersediaan produksi, rantai pasok dan pasar, kebijakan pendukung, infrastruktur yang memadai, sistem produksi yang terintegrasi, jaminan keamanan pangan, akses permodalan, SDM, dan penerapan teknologi. Industri perunggasan yang berdaya saing setidaknya memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dimana keunggulan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan daya saing.

Pengukuran daya saing industri perunggasan dapat dikaji dari konsep keunggulan komparatif yang menitikberatkan pada konsep kelayakan dan efisiensi usaha secara ekonomi, dan keunggulan kompetitif yang lebih fokus pada kelayakan secara finansial. Kondisi distorsi yang dihadapi dapat berpengaruh terhadap pencapaian daya saing yaitu: (i) Kebijakan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung, dan (ii) Adanya monopoli atau monopsoni domestik sehingga menyebabkan terjadinya pasar tidak sempurna. Jika perekonomian tidak mengalami distorsi, maka industri perunggasan merupakan ukuran dari keunggulan komparatif yang potensial secara ekonomi (Daryanto, 2010).

Pengukuran status daya saing sektor agribisnis dapat menggunakan pendekatan pengukuran melalui

Relative Trade Advantage (RTA), sedangkan analisis status daya saing dapat menggunakan *Agribusiness Executive Survey* (AES). Saat ini alat ukur daya saing banyak menggunakan *Revealed Competitive Advantage* (RCA) serta mulai dikembangkan *Policy Analysis Matrix* (PAM). Alat ukur PAM mampu menghasilkan dua indikator pengukur daya saing keunggulan kompetitif (*Private Cost Ratio*/PCR) dan keunggulan komparatif (*Domestic Resource Cost Ratio*/DRCR). Daryanto (2014) melaporkan bahwa komoditas perunggasan memiliki daya saing yang moderat dengan nilai koefisien DRCR dan PCR antara 0,50 – 0,70.

Peningkatan daya saing perunggasan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam suatu pendekatan holistik. Restrukturisasi industri perunggasan dapat dilakukan dengan pembenahan pada semua lini mulai dari hulu – hilir, dari produksi, pengolahan, distribusi, RPA, sampai dengan jalur pemasaran. Efisiensi merupakan esensi dari daya saing industri perunggasan dimana didalamnya terdapat kemampuan produk untuk dapat bersaing di pasar bebas. Tangendjaja (2014) melaporkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi daya saing industri perunggasan meliputi biaya produksi dan biaya tenaga kerja, iklim usaha yang kondusif, usaha yang terintegrasi, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi dengan cepat, efisien, dan dalam skala besar.

Peningkatan daya saing industri perunggasan perlu diakselerasi dengan melakukan restrukturisasi perusahaan perunggasan untuk dapat melakukan usaha secara terintegrasi. Usaha ini dapat memberikan manfaat perusahaan dengan meningkatkan efisiensi dan mampu menghasilkan produk unggas sesuai dengan permintaan konsumen. Dukungan kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong perusahaan perunggasan terintegrasi dan mampu mengembangkan ke pasar ekspor, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri perunggasan Indonesia.

Menurut Daryanto (2014) restrukturisasi pada industri perunggasan dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dari usaha yang dilakukan oleh peternak skala kecil, pengaturan zona produksi, penataan kembali RPA dalam negeri, sistem pemasaran rantai dingin dan mengurangi pemasaran unggas dalam bentuk *live bird*. Terkait dengan restrukturisasi tersebut, manajemen rantai pasok (*supply chain management*) dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing perunggasan di Indonesia. Peningkatan daya saing industri perunggasan juga perlu memperhatikan sistem kemitraan usaha atau *contract farming* untuk meningkatkan skala usaha, peningkatan produktivitas, perluasan dan jaminan pasar, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Saptana (2014) melaporkan bahwa model kemitraan usaha broiler yang paling ideal adalah model *contract farming* berbasis *cluster* yang mampu mengurangi biaya ekonomi transaksi dan

pengontrolan proses produksi mulai dari hulu – hilir sehingga mampu menghasilkan produk unggas yang berdaya saing.

Melihat perkembangan industri perunggasan di Thailand yang sudah sangat maju, Indonesia dapat mencontohnya karena agro ekosistem yang relatif hampir sama. Misalnya, harga pakan untuk menghasilkan per ekor broiler dengan bobot 2,3 kg hanya 77% dibandingkan dengan harga pakan di Indonesia. Bobot potong di Indonesia hanya mencapai 1,7 kg dengan dengan tingkat kematian yang 1,5% lebih tinggi. Indikator biaya produksi ini mengakibatkan lebih mahal di Indonesia sebesar 1,3 kali lipat dibandingkan dengan Thailand. Hal ini mengakibatkan harga ayam hidup di Indonesia lebih mahal sebesar USD 3,3 cent/kg berat hidup atau pada harga karkas menjadi lebih mahal sebesar USD 4,7 cent/kg. Indonesia cukup kompetitif dalam menghasilkan produk dada ayam, lebih murah USD 17 cent/kg, namun jauh lebih mahal dalam menghasilkan produk paha ayam sebesar USD 96 cent/kg. Hal ini disebabkan karena produk paha ayam merupakan produk surplus yang diekspor bagi Thailand.

ANCAMAN MASUKNYA PRODUK AYAM IMPOR TERHADAP DAYA SAING PETERNAKAN RAKYAT

Pada tanggal 19 Desember 2014 telah ditandatangani kesepakatan kerjasama investasi perusahaan multinasional Brazil dan perusahaan swasta nasional di Indonesia untuk memproduksi pangan olahan berbasis daging unggas. Kerjasama ini dipandang cukup strategis dengan komposisi saham berimbang (masing-masing 50%) karena kedua perusahaan besar ini akan membangun produk pangan dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*) yang berkualitas, mengembangkan pengolahan daging secara lokal dan sekaligus memperluas jaringan distribusi dengan saluran layanan ritel dan pangan di berbagai kota di Indonesia. Kerjasama patungan ini diharapkan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang tinggi, karena dapat meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing industri perunggasan di dalam negeri, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Brazil merupakan *benchmark* yang sangat baik dalam kesuksesannya mentransformasi industri perunggasan menjadi industri modern selama satu dekade terakhir, dan mampu memposisikan sebagai negara terbesar kedua setelah Amerika Serikat dalam memproduksi daging unggas. Brazil juga merupakan negara eksportir terbesar di dunia dengan wilayah

pemasaran yang sangat luas, lebih di 150 negara (Daryanto, 2015). Pertumbuhan industri perunggasan ini mampu mencapai rata-rata 15%/tahun yang sangat konsisten dan tingkat harga yang sangat kompetitif dan relatif stabil (USD 1,3/kg berat hidup), lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat.

Keunggulan kompetitif Brazil dibandingkan negara lain dalam industri perunggasan juga ditunjukkan oleh produksi jagung didalam negeri yang berlimpah, sehingga dapat menekan sebagian besar biaya produksi pakan. Jagung merupakan bahan utama pakan yang digunakan dalam industri perunggasan dengan komponen sekitar 70% dari biaya produksi (Daryanto, 2015). Hal ini menjadikan Brazil unggul dalam hal *cost leadership* di pasar tujuan ekspor. Hal lain yang mempengaruhi terhadap daya saing industri perunggasan di Brazil adalah keberhasilan dalam menciptakan diferensiasi produk sesuai dengan preferensi konsumen yang serba praktis. Terlebih Brazil juga sudah menerapkan rumah potong halal bagi produk unggasnya, sehingga negara-negara islam seperti Indonesia dan Timur Tengah menjadi incaran pasar yang strategis.

LANGKAH TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Peningkatan daya saing menjadi kata kunci dalam menangkal masuknya produk unggas dari luar negeri yang akan merugikan industri perunggasan di dalam negeri. Arah industri perunggasan ke depan harus dapat mewujudkan kedaulatan pangan dengan strategi meningkatkan daya saing untuk menghadapi ancaman global. Beberapa kesimpulan yang merupakan pandangan penting meliputi:

1. Kerjasama investasi yang merupakan *Foreign Direct Investment* dapat memberikan pertumbuhan bisnis dengan akses kepada saluran pasar dan teknologi baru serta kualitas produk, keahlian dan pembiayaan, namun kepentingan *mutual benefit* harus tetap dikedepankan. Kerjasama yang dibangun antara perusahaan multinasional Brazil dan perusahaan swasta nasional di Indonesia dengan investasi sekitar Rp. 2 trilyun (masing-masing pemilikan saham 50%) telah mensyaratkan bahwa seluruh kebutuhan bahan baku harus dipasok dari Brazil. Konsekuensi logis dari persyaratan ini adalah akan terancamnya keberlangsungan industri perunggasan di dalam negeri yang sampai saat ini telah mampu menyediakan pangan hewani yang terjangkau oleh bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Telur dan daging unggas adalah sumber protein hewani yang sangat terjangkau/murah, dengan rata-rata konsumsinya yang terus meningkat

walaupun masih rendah (10 kg/kap/tahun) dibandingkan negara lain. Dengan masuknya produk perunggasan menjadi produk pangan strategis, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap produksi dan distribusinya untuk stabilisasi harga.

2. Untuk memperkuat dan mengembangkan industri perunggasan nasional diperlukan kekompakan dan kebersamaan semua pihak, antara lain melalui: (i) Harmonisasi kebijakan antar kementerian, (ii) Kerjasama antara pelaku usaha hulu-*on farm*-hilir, (iii) Kerjasama antara petani jagung dengan pabrik pakan, dan (iv) Kerjasama antara pengusaha besar dengan peternak kecil. Selain itu juga diperlukan upaya yang lebih *massive* untuk mempromosikan konsumsi telur dan daging unggas dalam rangka mewujudkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat.
3. Berkaitan dengan berbagai kondisi tersebut diatas, penguatan industri perunggasan nasional juga harus didukung dengan harmonisasi regulasi antar kementerian terutama yang berkaitan dengan: (i) persyaratan pemasukan produk perunggasan dan olahannya, (ii) daftar usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal asing bagi produk perunggasan. Perlu dilakukan peninjauan kembali, diantaranya Perpres Nomor 39/2013 serta Permentan Nomor 84/2013 dan Permentan Nomor 139/2014.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan meliputi:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk kemudahan/fasilitasi budidaya sistem *closed house* serta akses distribusi dan tata niaga dari produsen ke konsumen, fasilitasi subsidi bunga pinjaman dan pajak investasi, serta penyediaan infrastruktur (jalan, listrik) bagi pengembangan usaha.
2. Mengawasi dengan ketat pola produksi dan distribusi produk perunggasan sebagai produk pangan strategis dan politis, yang mampu berperan penting dalam penyediaan protein hewani terjangkau untuk pengembangan dan pertumbuhan SDM Indonesia.
3. Mendorong rancangan induk (*grand design*) dan peta jalan (*road map*) baru bagi sistem-usaha perunggasan nasional, regional dan di tingkat peternak, termasuk strategi, infrastruktur dan manajemen.
4. Menerapkan manajemen koordinatif secara intensif dan efektif antara Kementerian Pertanian, kementerian lain, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka pengendalian produksi dan stabilitas harga yang menguntungkan bagi peternak dan terjangkau oleh konsumen.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif termasuk pembebasan PPN bagi beberapa input utama, serta

harmonisasi tarif bea masuk bahan baku yang diperlukan oleh industri perunggasan.

6. Mendorong peningkatan investasi PMA dan PMDN untuk pembangunan industri pengolahan daging ayam di dalam negeri, sehingga dapat menjadi *buffer* pada kondisi *over supply* di tingkat produksi, serta berperan memasok kebutuhan ekspor pada saat kondisi normal.
7. Menyediakan kebijakan fiskal yang atraktif untuk pengembangan industri perunggasan yang merupakan industri padat modal dengan tingkat pengembalian modal yang relatif rendah.
8. Mengembangkan regulasi efektif untuk mendorong promosi dan proteksi dalam upaya meningkatkan produksi, konsumsi dan melindungi perunggasan nasional.
9. Mengembangkan organisasi dan manajemen yang profesional dengan kepemimpinan kuat di tingkat pusat dan daerah melalui kegiatan pelatihan dalam rangka memberikan jaminan penyediaan SDM yang kompeten bagi industri. Hal ini juga berpengaruh terhadap percepatan pelayanan perizinan usaha perunggasan, utamanya terkait dengan tata ruang pewayalahan.
10. Mendorong peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga penelitian kementerian dan perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi

yang diperlukan oleh industri perunggasan
Indonesia.

**MATRIKS RENCANA TINDAK KERJASAMA
INDUSTRI PENGOLAHAN AYAM BERBAHAN
BAKU IMPOR**

Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
I. Kebijakan Investasi Mendukung Industri Perunggasan			
Mendorong peningkatan investasi PMA dan PMDN untuk pembangunan industri pengolahan daging ayam di dalam negeri	Peraturan Pemerintah	2016-2019	BKPM Kementerian Perdagangan Perusahaan Swasta
II. Kebijakan untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Industri Perunggasan			
Percepatan perbaikan infrastruktur (jalan, pasar, dlsb)	Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	2016	Kementerian PU Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertanian
Pembebasan PPN bagi beberapa input utama dan harmonisasi tarif bea masuk bahan baku	Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	2016	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Asosiasi Perunggasan

Menyediakan fiskal yang atraktif untuk pengembangan	Peraturan Menteri tentang insentif perunggasan	2016-2018	Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian
Sosialisasi dan promosi produk perunggasan nasional sebagai produk pangan strategis	Perubahan pola pandang dan pola konsumsi produk unggas	2016-2019	Kementerian Pertanian dan Asosiasi Perunggasan
Diferensiasi produk pengolahan daging ayam	Memperluas pasar sesuai preferensi konsumen	2016-2019	Kementerian Pertanian dan Asosiasi Perunggasan
Evaluasi regulasi efektif untuk mendorong promosi dan proteksi perunggasan nasional	Regulasi dalam upaya meningkatkan produksi, konsumsi dan melindungi perunggasan dalam negeri	2016 - 2018	Ditjen PKH Kementerian Pertanian
III. Penelitian dan Pengembangan Perunggasan Nasional			
Membangun rancangan induk (<i>grand design</i>) dan	<i>Grand design</i> dan road map sistem usaha	2016 - 2017	Badan Litbang Pertanian, Perguruan

peta jalan (<i>road map</i>) baru bagi sistem-usaha perunggasan nasional	perunggasan nasional		Tinggi, Ditjen PKH, Asosiasi Perunggasan
Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi yang diperlukan oleh industri perunggasan Indonesia	Inovasi teknologi untuk peningkatan efisiensi	2016 - 2018	Badan Litbang Pertanian dan Perguruan Tinggi

DAFTAR BACAAN

- Daryanto, A. 2010. Posisi Daya Saing Pertanian Indonesia dan Upaya Peningkatannya. Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor, 14 Oktober 2009. Hlm: 1 – 35.
- Daryanto, A. 2014. Industri Perunggasan Indonesia dalam Era Pasar AEC 2015: Peluang dan Tantangan. Disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Perunggasan Indonesia yang Berdayasaing dan Berkelanjutan dalam Era AEC". Auditorium Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tanggal 15 November 2014.
- Daryanto. 2015. Transformasi Industri Perunggasan: Pelajaran dari Brazil. Trobos Livestock, Edisi 185, Tahun XVI, Februari 2015.
- Dawami, A. 2015. Ancaman Masuknya Produk Ayam terhadap Daya Saing Usaha Peternakan Rakyat. *Roundtable Meeting*: Menyikapi Kerjasama Investasi Industri Pengolahan Ayam Berbahan Baku Impor. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta, 15 April 2015.
- Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor
84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang
Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan atau
olahannya ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Saptana. 2014. Dinamika Kemitraan Usaha Industri
Broiler Berdaya Saing. Dalam: Memperkuat Daya
Saing Produk Pertanian. IAARD Press. Jakarta.
Hlm. 581 – 608.

Tangendjaja, B. 2014. Usaha Meningkatkan Daya Saing
Perunggasan Indonesia. Dalam: Memperkuat
Daya Saing Produk Pertanian. IAARD Press.
Jakarta. Hlm. 307 – 340.

Utoyo, D. 2015. Perunggasan Indonesia. *Roundtable
Meeting*. Menyikapi Kerjasama Investasi Industri
Pengolahan Ayam Berbahan Baku IMpor. Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta,
15 April 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor: 33/OT.050/I.5/01/2015 Tanggal 23 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, maka Tim dimaksud adalah:

**TIM KAJIAN ANTISIPATIF DAN RESPONSIF
KEBIJAKAN STRATEGIS PETERNAKAN DAN
VETERINER**

1. Prof (R) Dr. Syamsul Bahri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Prof (R) Dr. Kusuma Diwyanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Prof (R) Dr. Budi Haryanto, Balai Penelitian Ternak
5. Prof (R) Dr. Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
6. Dr. drh. Suhardono, Balai Besar Penelitian Veteriner
7. Dr. Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
8. Dr. Eko Handiwirawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

9. Dr. Wisri Puastuti, Balai Penelitian Ternak
10. Priyono, SPT, MS., Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
11. Mohammad Ikhsan Shiddieqy, S.Pt., Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

TIM PERUMUS

1. Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, M.Sc, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Prof (R) Dr. Ir. Kusuma Diwyanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Dr. Eko Handiwirawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

L A M P I R A N

PERKEMBANGAN PERUNGGSAN INDONESIA

Don P. Utoyo

Ketua Umum Federasi Masyarakat Perunggsan
Indonesia

RINGKASAN

Usaha perunggsan di Indonesia berkembang sangat cepat mulai dari peningkatan populasi sampai dengan perkembangan teknologinya. Berawal dari usaha sampingan, saat ini usaha perunggsan sudah berkembang menjadi bisnis modern yang didukung dengan perkembangan dari hulu – hilir. Konsumsi per kapita produk unggas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan peningkatan konsumsi daging broiler sebesar 7,5 kg (2010); 10 kg (2014); dan 15 kg (estimasi 2018). Adapun konsumsi telur juga menunjukkan peningkatan dari 5 kg (2010); 8 kg (2014); dan 12 kg (estimasi 2018).

Perbaikan genetik telah diupayakan untuk menghasilkan strain-strain ayam *final stock* yang menghasilkan performa yang lebih baik. Saat ini telah ada perkembangan lebih dari 50 strain seperti Cobb, Lohmann, Hubbard, ISA, AA, Hy-line, dan strain lain. Produksi DOC broiler mengalami peningkatan dari 1,8 milyar ekor (2010); 2,5 milyar ekor (2014); dan pada tahun 2018 produksi DOC diperkirakan mencapai 4

milyar ekor. Alat dan mesin pendukung usaha perunggasan juga telah mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri perunggasan. Pakan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan produktivitas unggas, sehingga jaminan kuantitas dan kualitas menjadi sangat penting. Pabrik pakan tumbuh cukup pesat, dari 60 buah pabrik dengan produksi 9,9 juta ton pada tahun 2010 menjadi 80 pabrik pada tahun 2015 dengan produksi mencapai 15 juta ton. Perkembangan pendukung lainnya meliputi pakan imbuhan, premiks, obat-obatan, serta obat hewan dan vaksin.

Perkembangan perunggasan di Indonesia dengan didukung pasar yang potensial tersebut mendorong investor untuk berinvestasi pada usaha perunggasan. Perusahaan pangan olahan asal Brazil merupakan salah satu investor yang berusaha memasukkan produk unggas ke pasar Indonesia. Perusahaan asal Brazil tersebut berencana membuat usaha bermitra dengan sebuah perusahaan multinasional Indonesia dalam bidang perunggasan dan produk olahan makanan dengan bahan baku impor asal Brazil. Rencana kerjasama antara tersebut perlu diwaspadai dampaknya terhadap peternak ayam di Indonesia. Sistem jaminan kehalalan produk unggas juga perlu diperhatikan sebagaimana telah diterbitkannya Permentan No. 139 tahun 2014 tentang pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa produk unggas perlu

didukung dengan sistem jaminan kehalalan di seluruh rumah potong hewan unggas di negara asal yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

PERKEMBANGAN INVESTASI PADA USAHA PETERNAKAN (AYAM RAS)

Septiria Christina

Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya
Alam Lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal

RINGKASAN

Investasi usaha perunggasan sangat menjanjikan, hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi PMDN sektor industri makanan dari unggas tahun 2010 – 2014 sebesar 95,4% dengan pertumbuhan sektor perdagangan ternak dan daging unggas sebesar 2.519,2%. Adapun untuk realisasi PMA, rata-rata 52,3% untuk industri makanan dari unggas dan 106,7% untuk sektor perdagangan ternak dan daging unggas. Kontribusi produksi daging unggas terhadap total produksi daging nasional mencapai 62,56% dan produksi telur unggas terus mengalami peningkatan dari 1,46 juta ton pada tahun 2011 dan 1,72 ton pada tahun 2013. Hal tersebut juga didukung dengan adanya peningkatan konsumsi daging ayam nasional yang meningkat dari 4,99 kg per kapita (2011) menjadi 6,97 kg per kapita (2012) dan diperkirakan daya konsumsi meningkat menjadi 15,15 kg per kapita pada tahun 2018.

Kebijakan investasi usaha peternakan di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu: (i) PP No. 102/2000 tentang Standardisasi Nasional dan Permentan No. 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian; (ii) Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan; (iii) INPRES No. 22 Tahun 1988 tentang penghapusan kewajiban memiliki rekomendasi instansi teknis dan permohonan persetujuan penanaman modal; (iv) PP No. 16 Tahun 1977 tentang usaha peternakan; (v) UU No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 30; dan (vi) Peraturan perundangan lain yang terkait dengan peternakan. Dalam kewenangan perizinan investasi sesuai Permentan Nomor 3480/Kpts/HK.300/10/2009, penerbitan semua izin memerlukan rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Dalam investasi usaha ayam ras di Indonesia, terdapat permasalahan utama yang dihadapi, yaitu kurang tersedianya bahan baku pakan yang berasal dari sumber daya domestik; mewabahnya penyakit flu burung atau *Avian Influenza*; dan struktur pasar yang dikuasai oleh pedagang besar yang melemahkan posisi peternak kecil. Hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dalam pengelolaan sektor unggas terdiri dari: (i) Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung usaha peternakan unggas; (ii) Penyediaan fasilitas fiskal yang

atraktif untuk pengembangan industri berbasis SDA; dan
(iii) Percepatan pelayanan perizinan di level Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (koordinasi, harmonisasi,
dan sinergi).

MENGEMBANGKAN DAYA SAING INDUSTRI PERUNGGANAN INDONESIA

Rachmat Pambudy

Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian
Bogor

RINGKASAN

Industri perunggasan di Indonesia memiliki peran sebagai penggerak pertumbuhan subsektor peternakan yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, industri kreatif, tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Daya saing industri perunggasan dihadapkan pada permasalahan dalam industri perunggasan yang meliputi distribusi pemasaran yang tidak seimbang, tingginya laju inflasi dan instabilitas makro, model usaha budidaya, dan kondisi kemampuan bersaing produk perunggasan. Dalam industri pengolahan, ketersediaan bahan baku dan minimnya ketersediaan *freezer* di Rumah Potong Hewan dan *mobile freezer* turut menjadi permasalahan utama dalam upaya mengembangkan daya saing industri perunggasan. Saat ini posisi Indonesia di pasar global masih menjadi net importer daging ayam ras.

Daya saing industri perunggasan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang terdiri dari bibit dan indukan, DOC, tatalaksana penggemukan,

panen, pengolahan, pasar, dan konsumen akhir. Agar mempunyai daya saing, maka faktor-faktor tersebut perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai, kemudahan perijinan dan sertifikasi, penelitian dan pengembangan, SDM yang berkualitas dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam mengembangkan industri perunggasan perlu didukung dengan kebijakan meliputi: (i) Memperjuangkan produk perunggasan sebagai produk pangan nasional guna menunjang pertumbuhan SDM Indonesia; (ii) Membangun *grand design* dan *road map* sistem usaha perunggasan nasional, regional, dan ditingkat peternak; (iii) Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang didukung dengan adanya koordinasi intensif dalam pengendalian produksi dan stabilitas harga; dan (iv) Pengembangan kebijakan proteksi, penyediaan SDM, serta penelitian dan pengembangan dalam melindungi perunggasan nasional.

Strategi pengembangan daya saing industri perunggasan dapat diarahkan pada upaya sinergi subsistem agribisnis hulu, onfarm, pengolahan, dan pemasaran dengan berprinsip pada strategi berorientasi ekspor dan substitusi impor. Dalam mengakselerasi peningkatan daya saing industri perunggasan di Indonesia diperlukan regulasi yang efektif dalam rangka promosi, proteksi dan penerapannya. Disamping itu, diperlukan adanya pengembangan profesionalisme organisasi dan manajemen baik pemerintah, perusahaan perunggasan, maupun pada tingkat peternak.

ANCAMAN MASUKNYA PRODUK AYAM TERHADAP DAYA SAING USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Achmad Dawami

Ketua Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia

RINGKASAN

Peningkatan kemampuan bersaing usaha peternakan rakyat diperlukan guna menghadapi persaingan dengan perusahaan perunggasan. Adanya kemungkinan masuknya produk ayam dari luar negeri ke Indonesia harus diantisipasi dengan peningkatan kapasitas produksi DOC, peningkatan mutu genetik, penerapan teknologi budidaya, dan efisiensi konsumsi pakan. Secara nasional, produksi DOC ayam broiler dan layer tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan dengan diiringi adanya perkembangan genetik yang semakin baik, contohnya persentase daging dada ayam meningkat dari 14% (tahun 1980) menjadi 20% (tahun 2000). Dalam perkembangan teknologi perunggasan telah banyak pemanfaatan model kandang dalam upaya mencapai pertumbuhan optimal, peningkatan efisiensi RPA serta transportasi dan rantai dingin. Pemenuhan kebutuhan pakan unggas di Indonesia juga sudah didukung dengan 68 pabrik pakan dengan kapasitas 18.500 ton/tahun. Peternakan unggas rakyat perlu

menerapkan strategi peningkatan kapasitas produktivitas untuk meningkatkan daya saing.

Daya saing usaha peternakan rakyat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan industri perunggasan di Indonesia yang meliputi: (i) Keseimbangan antara penawaran dan permintaan terhadap produk daging; (ii) Adanya ketersediaan dan validitas data mengenai industri perunggasan; (iii) Kecepatan pertumbuhan usaha mulai dari hulu, budidaya, hilir, sampai dengan konsumsi; (iv) Bahan baku pakan; (v) Sinergi antara kebijakan lintas kementerian, pusat dan daerah; dan (vi) Adanya pemberlakuan pasar bersama (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Ancaman masuknya produk ayam terhadap daya saing usaha peternakan rakyat perlu diimbangi dengan adanya peningkatan produksi DOC, pengaturan efisiensi pakan, peningkatan fasilitas kandang untuk mengoptimalkan produksi, peningkatan fasilitas RPA, peluang akses permodalan, dan edukasi pada masyarakat. Sebagai tindaklanjutnya, dibutuhkan adanya *business plan* yang terintegrasi bagi peternakan rakyat dalam meningkatkan daya saing.

ISBN : 978-602-8475-91-4

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

Telp. (0251) 8322185, 8322138

Fax. (0251) 8328382, 8380588

E-mail : criansci@indo.net.id